

# DAMPAK KEBIJAKAN

## PEMBANGUNAN PLAZA IKAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN TUBAN<sup>1</sup>

### *POLICY IMPACT OF FISH PLAZA DEVELOPMENT IN EFFORT TO EMPOWER COASTAL COMMUNITIES IN TUBAN REGENCY*

Denny Iswanto<sup>2</sup>

Email: [dennyiswanto@uwp.ac.id](mailto:dennyiswanto@uwp.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Despite having great fisheries potential, in fact coastal areas are very identical to poverty, including in Tuban Regency. One of the government's policies in dealing with poverty in coastal areas is the construction of the Tuban Fish Plaza (PIT). PIT is a place for buying and selling and auctioning fishery products, both fresh fish, smoked fish and other processed fish on a small, medium and large scale which is built in a modern way and rented out for free. However, this policy has not had a significant impact on traders' income. The purpose of this study was to determine the impact of the PIT development policy in increasing the income of coastal communities in Tuban Regency. This study uses qualitative research with secondary data analysis methods. The results of the study showed that a number of fish traders who previously traded on the roadside and sidewalks experienced a decrease in income after selling at PIT. In addition to the impact of the Covid-19 Pandemic, this relocation policy is also considered to distance traders from buyers. On the other hand, the absence of price standardization determined by the government has resulted in unfair price competition by a number of traders. From these findings, it can be said that this development policy is not yet optimal because there is no adequate governance system to regulate adequate business procedures and processes.*

**Keywords:** Policy Impact; Fish Plaza; Empowerment.

#### **ABSTRAK**

Meskipun memiliki potensi perikanan yang besar, nyatanya wilayah pesisir sangat identik dengan kemiskinan, tidak terkecuali di Kabupaten Tuban. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan di wilayah pesisir adalah dengan dibangunnya Plaza Ikan Tuban (PIT). PIT merupakan tempat jual beli dan pelelangan produk perikanan baik itu ikan segar, ikan asap dan ikan olahan lainnya dalam skala kecil, menengah dan besar yang dibangun secara modern dan disewakan secara cuma-cuma. Akan tetapi dengan kebijakan ini belum memberikan dampak yang signifikan

---

<sup>1</sup> Diterima 10 Juni 2024, direvisi 1 November 2024

<sup>2</sup> Dosen di Universitas Wijaya Puta, Surabaya.

terhadap pendapatan pedagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari kebijakan pembangunan PIT dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pedagang ikan yang sebelumnya berdagang di pinggir jalan dan trotoar mengalami penurunan pendapatan setelah berjualan di PIT. Selain dikarenakan dampak Pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan relokasi ini juga dianggap menjauhkan pedagang dengan pembeli. Disisi lain, belum adanya standardisasi harga yang ditentukan pemerintah mengakibatkan terjadinya persaingan harga yang tidak wajar oleh sejumlah pedagang. Dari temuan tersebut dapat dikatakan belum optimalnya kebijakan pembangunan ini dikarenakan belum adanya sistem tata Kelola yang memadai untuk mengatur tatalaksana dan proses bisnis yang memadai.

**Kata Kunci:** Dampak Kebijakan; Plaza Ikan; Pemberdayaan.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), memiliki luas wilayah perairan mencapai sekitar dua pertiga dari total luasnya, yakni sekitar 3.273.810 km<sup>2</sup>. Wilayah ini menyimpan kekayaan sumber daya alam kelautan yang berpotensi besar untuk dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mubiina, 2020). Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Bahkan, terdapat fenomena yang dikenal sebagai "Kutukan Sumber Daya Alam," di mana wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan sebagian besar masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan (Hilal, 2017).

Kehidupan masyarakat pesisir berbeda dari masyarakat pada umumnya karena mereka bergantung langsung pada ekosistem yang menjadi sumber kehidupan, di mana pemanfaatan sumber daya alam pesisir

dan laut sangat memengaruhi keseharian masyarakat setempat (Nurdiansyah et al., 2023). Masyarakat pesisir merujuk pada kelompok yang tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan perekonomian mereka secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir melalui aktivitas penangkapan dan budidaya. Meskipun wilayah pesisir berperan sebagai penghasil ikan, kawasan ini juga dikenal memiliki tingkat pendapatan penduduk yang relatif rendah, sering kali berada di bawah garis kemiskinan (Febriandini et al., 2023). Menurut data, di Indonesia terdapat wilayah pesisir yang mencakup 8.090 desa dengan rata-rata indeks tingkat kemiskinan sebesar 0,3241 (Saptutyningasih, 2023). Data tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 32% dari masyarakat pesisir tergolong dalam kategori miskin.

Kemiskinan yang sering menjadi "ciri khas" masyarakat pesisir dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, seperti kesejahteraan yang berada di bawah standar, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi pemukiman yang

kumuh, serta kerentanan terhadap perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, mereka sering kali tidak berdaya dalam menghadapi intervensi dari pemodal dan penguasa yang datang (Ramadhani, 2017). Melihat realitas yang ada, diperlukan perubahan melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses terencana untuk meningkatkan utilitas atau kapasitas dari objek yang diberdayakan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan (Windasai et al., 2021). Memberdayakan masyarakat pesisir artinya membuka peluang bagi mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan melaksanakan berbagai kegiatan, yang pada akhirnya menghasilkan kemandirian yang berkelanjutan dalam kehidupan (Irawan & Tanzil, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban, yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki kawasan perkampungan nelayan sepanjang 65 km, membentang dari Kecamatan Bancar hingga Kecamatan Palang. Wilayah tersebut memiliki karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam serta berpotensi besar dalam sumber daya perikanan laut dan budidaya air payau (Suprpti, Munir, & Zaenuddin, 2020). Meskipun memiliki potensi sumber daya yang luar biasa tersebut, belum dapat memberikan

dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban secara signifikan. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, Kabupaten Tuban terus berada dalam daftar 10 daerah kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur. (Iswanto, 2021).

Tabel 1. Perkembangan jumlah penduduk miskin kabupaten tuban 2021-2023  
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Indikator	Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin	192.580	178.050	177.250

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban tercatat sebanyak 192.580. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 178.050, dan pada tahun 2023 turun lebih lanjut menjadi 177.250. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban masih tergolong tinggi, mencapai 16,31% pada tahun 2023, dan menempatkannya pada peringkat kelima sebagai daerah termiskin di provinsi tersebut (Debila, 2023).

Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan intervensi pemerintah yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah kebijakan dalam menangani permasalahan ini adalah melalui

pembangunan Plaza Ikan Tuban (PIT). PIT dirancang sebagai pusat perdagangan hasil laut bagi para nelayan. Plaza Ikan berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan yang terintegrasi secara modern, menggabungkan penjualan ikan segar, ikan asap, dan berbagai produk olahan ikan (Suprapti, Munir, & Zaenuddin, 2020). Peran PIT sangat signifikan dalam menyediakan fasilitas yang memadai. Selain itu, keberadaan PIT juga berkontribusi pada peningkatan ketertiban di jalan, mengingat sebelum pembangunan PIT, trotoar sering dijadikan tempat jualan oleh pedagang ikan asap. Dengan adanya PIT, para pedagang kaki lima tersebut direlokasi ke dalam plaza untuk menertibkan penggunaan jalan dan trotoar. Pembangunan PIT merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong sektor perikanan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Pembangunan ini didesain tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur perikanan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dampak kebijakan ini guna menilai sejauh mana tujuan pemberdayaan telah tercapai. Kebijakan pembangunan ini memberikan dampak bagi masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, termasuk dampak terhadap individu yang bukan merupakan sasaran, serta dampak pada kondisi saat ini dan di masa mendatang, serta dampak terkait biaya. (Anderson, 1984). Dampak kebijakan merujuk pada

keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini mencakup berbagai perubahan yang terjadi sebagai hasil dari implementasi kebijakan tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dampak ini dapat mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung atau tidak langsung (Amiri et al., 2017).

Dampak dari adanya kebijakan pembangunan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek. dari aspek ekonomi, adanya PIT memberikan dampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui adanya retribusi. Pada aspek sosial memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif diantaranya adalah dampak lingkungan dan adanya konflik antar pedagang karena persaingan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru di masyarakat karena kurang adanya tata kelola PIT dan dampaknya belum diantisipasi dengan perencanaan yang matang.

Dengan adanya masalah tersebut artikel ini mencoba untuk membahas mendalam mengenai dampak kebijakan pembangunan PIT dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban dari berbagai aspek dan mencoba membebrikan rekomendasi atas beberapa temuan. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pengembangan konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa depan.

## **B. LITERATURE REVIEW**

### **1. Dampak Kebijakan**

Dampak kebijakan merupakan salah satu aspek atau kategori dalam evaluasi kebijakan publik. Berdasarkan teori Anderson, evaluasi atau penilaian kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan, mencakup substansi, implementasi, dan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Winarno, 2016). Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan dianggap sebagai aktivitas yang fungsional, yang berarti bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga berlangsung sepanjang seluruh proses kebijakan, mulai dari tahap perumusan masalah, implementasi, hingga hasil dan dampaknya.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa dampak kebijakan (policy impact atau policy consequences) adalah keseluruhan efek yang dihasilkan oleh suatu kebijakan atau program dalam konteks kehidupan nyata (Winarno, 2016). Ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan mencakup semua efek yang muncul akibat dari kebijakan tersebut, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, dan dapat terjadi di setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perumusan masalah, implementasi, hingga hasil dan dampaknya.

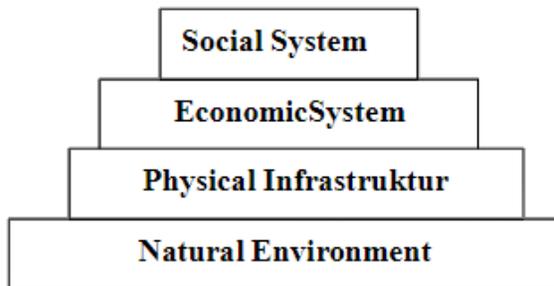
William Dunn mengemukakan bahwa terdapat lima indikator atau kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan (Subarsono, 2012). Indikator-indikator ini berfungsi untuk menilai efektivitas dan dampak dari suatu kebijakan yang telah diterapkan.

Pertama, efektivitas menilai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, kecukupan mengukur sejauh mana hasil yang dicapai mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga, pemerataan menilai distribusi biaya dan manfaat, yaitu apakah keduanya didistribusikan secara merata kepada berbagai kelompok masyarakat yang ada. Keempat, responsivitas mengevaluasi apakah hasil dari kebijakan tersebut sejalan dengan preferensi dan nilai-nilai kelompok, serta apakah kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan mereka. Terakhir, ketepatan menilai apakah hasil yang diperoleh memberikan manfaat yang nyata.

### **2. Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur merujuk pada rangkaian fisik yang mencakup transportasi, pengairan, drainase, bangunan, serta fasilitas publik seperti listrik, telekomunikasi, dan air bersih yang esensial untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi manusia (Grigg, 1988; Muhammad, 2008). Sebagai elemen utama, infrastruktur mendukung fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas dasar, peralatan, atau instalasi yang diperlukan untuk operasional sistem sosial dan ekonomi masyarakat (Grigg, 1988; Muhammad, 2008). Konsep ini dapat diterangkan melalui diagram yang menunjukkan interaksi infrastruktur dengan sistem lainnya. Dalam diagram tersebut, ditegaskan bahwa lingkungan alam mendukung

infrastruktur, sementara infrastruktur mendukung sistem ekonomi. Sistem sosial menjadi fokus yang diperkuat oleh sistem ekonomi.



Gambar 1. Diagram hubungan sistem sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan alam  
Sumber: Grigg (1988); Muhammad (2008).

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 1, lingkungan alami menjadi fondasi utama dari semua sistem, sehingga perlunya menjaga dan mengevaluasi dampak lingkungan saat membangun infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penghubung antara kegiatan ekonomi dan sosial manusia dengan alam. Jika infrastruktur tidak berfungsi dengan baik, akan mengakibatkan konsekuensi negatif bagi manusia dan ekosistem. Karena infrastruktur mendukung sistem sosial dan ekonomi, pemangku kebijakan perlu memahami dan mengakui pentingnya infrastruktur dalam pembangunan di tingkat makro hingga lokal. Dari sisi ekonomi, infrastruktur fisik dianggap sebagai modal sosial dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang signifikan sulit dicapai. Dalam ekonomi, infrastruktur fisik dianggap sebagai barang publik yang dikelola oleh pemerintah dan didanai oleh

masyarakat melalui pajak untuk manfaat bersama.

Walaupun demikian, pemerintah tidak secara eksklusif melaksanakan pembangunan infrastruktur, sehingga keterlibatan sektor swasta sebagai penyedia layanan menjadi penting. Diskusi tentang infrastruktur telah berubah dari pandangan ekstrem ke pandangan lain. Pada awalnya, ada keyakinan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Investor tidak akan tertarik berinvestasi di suatu negara tanpa fasilitas seperti listrik, transportasi, atau tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, fokus awal adalah membangun infrastruktur agar investasi di sektor lain bisa berjalan. Namun, tidak semua infrastruktur yang dibangun berujung pada kebutuhan yang efisien, dan ada fasilitas yang mungkin dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengguna.

Kurangnya dan kualitas rendah infrastruktur dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hal ini mendorong banyak perusahaan untuk menarik diri atau mengurangi ekspansinya. Oleh karena itu, infrastruktur menjadi elemen kunci dalam proses produksi dan menjadi syarat penting untuk menarik investasi dari sektor swasta. Infrastruktur yang baik dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung, seperti mengurangi waktu dan upaya dalam memperoleh air bersih, beraktivitas, atau berjualan. Dengan infrastruktur yang memadai, produktivitas meningkat dan biaya produksi dapat ditekan.

Menurut (Lewis, 1994), infrastruktur seharusnya mengikuti pertumbuhan investasi lainnya dengan tepat. Sebagai ilustrasi, jika investasi di sektor industri meningkat, maka kebutuhan akan pasokan listrik dan transportasi juga akan meningkat. Pihak yang bertanggung jawab atas infrastruktur publik perlu responsif terhadap permintaan yang meningkat ini. Dengan kondisi bisnis yang sehat, mendapatkan pendanaan untuk memperluas infrastruktur seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, hal-hal yang kurang mendesak, seperti kebutuhan domestik, mungkin tidak mendapat prioritas karena keterbatasan sumber daya. Penting untuk menghindari kesalahan dalam manajemen infrastruktur, di mana infrastruktur tertinggal dari kebutuhan atau tidak cukup menarik untuk investasi. Seperti di sektor lainnya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran infrastruktur harus selalu diperhatikan (Lewis, 1994).

Pemerintah daerah sering menunjukkan kepeduliannya dengan memperhatikan infrastruktur fisik, yang merupakan aspek vital bagi sektor bisnis dan industri. Sektor swasta memiliki kebutuhan khusus yang dapat bervariasi, baik secara spesifik maupun umum, dan pemerintah daerah bisa berupaya membuat standar yang seragam untuk infrastruktur tersebut. Artinya, pemerintah daerah dapat mengembangkan layanan atau fasilitas khusus untuk memenuhi tuntutan dari dunia bisnis dan industri. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi investasi sektor swasta adalah

daya tarik atau amenitas dari suatu wilayah atau kota, yang sering kali diartikan sebagai kualitas hidup. Ini mencakup fasilitas hiburan, pendidikan, perumahan, dan area perbelanjaan. Bagi industri, aspek "*livability*" atau kualitas hidup menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi. Dalam konteks ini, orientasi lokasi industri bisa dibagi menjadi dua: pertama, fokus pada pengurangan biaya transportasi; dan kedua, upaya untuk mengurangi biaya produksi (Kuncoro, 2003).

*The World Bank* membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu Infrastruktur ekonomi, Infrastruktur sosial dan infrastruktur administrasi (Agustina, 2020). Infrastruktur ekonomi, melibatkan aspek fisik yang mendukung kegiatan ekonomi, termasuk fasilitas umum seperti listrik, telekomunikasi, pasokan air, sanitasi, serta proyek infrastruktur lainnya seperti jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan transportasi seperti kereta api, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Infrastruktur sosial, fokus pada sektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan fasilitas rekreasi. Infrastruktur administrasi, mencakup aspek penegakan hukum, pengawasan administratif, dan koordinasi. Proses pengadaan infrastruktur dipengaruhi oleh dinamika antara penawaran dan permintaan, serta kebijakan publik. Menurut (Canning, 1999), kebijakan publik memiliki peranan penting, terutama saat mekanisme harga tidak bekerja secara sempurna dalam konteks infrastruktur. Meski demikian, peningkatan infrastruktur tidak selalu sejalan dengan peningkatan

pendapatan, kecuali jika biaya infrastruktur seragam di berbagai negara. Sebagai contoh, *The World Bank* menunjukkan bahwa biaya pembangunan jalan di negara dengan pendapatan menengah sekitar 2/3 dari biaya di negara kaya atau miskin. Ini menegaskan bahwa korelasi antara GDP per kapita dan infrastruktur melibatkan dinamika yang lebih kompleks daripada sekadar faktor penawaran dan permintaan.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan, secara etimologis, merujuk pada proses atau tindakan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu, yang mencakup aspek mental, usaha, atau tindakan (Depdiknas, 2003). Pada dasarnya, memberdayakan orang lain melibatkan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa melakukan transformasi mendasar pada budaya organisasi secara keseluruhan. Perubahan budaya ini sangat penting untuk mendukung sikap dan praktik yang lebih efektif dalam upaya pemberdayaan (Sumaryadi, 2005: 105).

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan individu dan kelompok yang mandiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan aktivitas yang dilakukan. Penting untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat yang mandiri. Menurut Ambar (2004: 80-81), keberdayaan yang terjadi di empat aspek—kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik—akan berkontribusi

pada tercapainya kemandirian masyarakat yang diinginkan. Dengan pemahaman yang memadai dan keterampilan yang baik, masyarakat akan merasakan kebutuhan akan pembangunan dan sadar akan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai kemandirian, diperlukan sebuah proses pembelajaran yang memungkinkan masyarakat secara bertahap memperoleh kemampuan dan daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, akumulasi kemampuan ini akan membantu mereka mencapai kemandirian. Pemberdayaan, yang merupakan manifestasi dari pembangunan sosial, diharapkan dapat menciptakan komunitas yang sehat dan masyarakat yang ideal.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang sangat bergantung pada informasi dari partisipan atau informan, dengan ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat terbuka, serta pengumpulan data yang umumnya bersifat subyektif.

Pendekatan deskriptif, sebagaimana diungkapkan oleh Pasolong (2021), digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini. Dengan demikian, pemilihan jenis dan pendekatan penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang

komprehensif tentang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik analisis sekunder, yang meliputi pengkajian dokumentasi dan data statistik yang relevan, serta wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif, yang mencakup tiga aktivitas utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini akan berfokus pada teori dampak kebijakan (*policy outcomes* atau *policy consequences*) dari Anderson dalam (Agung Husein S Pangkey Alden Laloma, 2020) Dimana dampak kebijakan mempunyai beberapa macam dimensi, diantaranya:

##### **Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) dan yang tidak diharapkan (*unintended consequences*)**

Dampak yang diharapkan dari kebijakan pembangunan plaza ikan adalah untuk memajukan sektor perikanan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merelokasi pedagang kaki lima dalam upaya penertiban dan memberikan fasilitas yang lebih memadai. Semua tujuan ini

yang diharapkan dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu, kebijakan Pembangunan ini juga salah satu Solusi bagi Masyarakat pedagang ikan di trotoar. Dengan adanya plaza ikan, PKL pedagang ikan akan di relokasi untuk memenuhi 30 stand yang telah disediakan. Secara garis besar, kebijakan yang diinginkan dari adanya Pembangunan ini adalah pengembangan ekonomi local, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor pariwisata.

*Pertama* yaitu untuk mengembangkan ekonomi lokal. Pembangunan proyek besar seperti pusat perbelanjaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Munculnya pusat perbelanjaan baru dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, baik dalam pembangunan maupun operasionalnya.

*Kedua*, untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Plaza Ikan Tuban (PIT) dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi yang dikenakan pada kegiatan bisnis di area tersebut. Terdapat empat objek retribusi daerah yang bisa di tarik sebagai sumber pendapatan yaitu penyewaan ruang pertemuan lantai 2 dan ruang pertemuan lantai 3. Selain itu, juga terdapat penyewaan *foodcourt* di lantai 2 dan perkantoran di lantai 3. Berikut adalah data spesifiknya:

Tabel 2. Retribusi Fasilitas Publik PIT

Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	OPD Pelaksana Pungutan
Ruang pertemuan lantai 2	650.000/8 jam Kelebihan jam = 50.000/jam	Dinas Perikanan dan Peternakan
Ruang pertemuan lantai 3	1.000.000/8 jam Kelebihan jam = 100.000/jam	
Lantai 2 foodcourt	2.000.000/tahun	
Perkantoran lantai 3	6.000.000/tahun	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021

Data diatas menunjukkan terdapat retribusi dan tarif pada masing-masing objek pajak yang ditarik oleh Dinas Perikanan dan Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pemakasian Kekayaan Daerah.

*Ketiga* adalah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai. Meningkatkan Infrastruktur melalui pembangunan proyek Plaza Ikan Tuban dapat memperkaya infrastruktur dalam membangun perekonomian Masyarakat. PIT sebagai salah satu barang publik

dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jual beli secara langsung. Proyek pembangunan seperti PIT dapat menciptakan lapangan pekerjaan selama fase konstruksi dan operasional. Dengan adanya peluang fasilitas ini dapat memberdayakan masyarakat setempat dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dengan adanya Pembangunan ini. Anggaran Pembangunan PIT telah dianggarkan sebesar 4,6M dari dana alokasi khusus Kabupaten Tuban.

Tabel 3. Anggaran Pembangunan PIT dan Sumbernya

APBD (Rp.)	DAK (Rp.)	Anggaran PIT (Rp.)
Rp. 2.279.700.867.753	Rp. 310.111.323.748	Rp. 4.600.000.000

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Data diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban mencapai Rp. 2.279.700.867.753,04, yang

mencakup Pendapatan Daerah dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi, serta Belanja Daerah untuk keperluan operasional, modal, dan

lainnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga turut berkontribusi dengan jumlah Rp. 310.111.323.748 untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang dianggap strategis. Selain itu, Kepala Daerah mengalokasikan Anggaran PIT sebesar Rp. 4.600.000.000 untuk mendukung pembangunan plaza ikan tuban. Total keseluruhan dana ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan operasional, pembangunan, dan inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam perspektif barang publik (*public goods*), adanya PIT ini memberikan akses ke masyarakat dengan lima indikator utama yaitu, akses publik ke sumber daya, penyediaan fasilitas umum, Pendidikan dan informasi public, Preservasi Lingkungan untuk Kesejahteraan Bersama, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.

Akses publik ke sumber daya telah dilakukan dengan memberikan akses publik yang lebih baik ke sumber daya perikanan di wilayah tersebut. Infrastruktur ini dirancang untuk memberikan akses yang adil dan terbuka bagi semua nelayan dan pedagang kecil sehingga dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap "*public goods*". Akses yang merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Kedua yaitu sebagai penyediaan fasilitas umum, PIT mencakup fasilitas umum seperti tempat pelelangan ikan, pusat informasi

perikanan, atau sarana pendukung bagi nelayan dan masyarakat setempat, hal ini dapat dianggap sebagai penyediaan "*public goods*". Fasilitas ini dapat meningkatkan efisiensi operasional nelayan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Ketiga yaitu Pendidikan dan informasi publik. Pembangunan seharusnya melibatkan program edukasi untuk masyarakat sekitar, misalnya, mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan perikanan atau praktik-praktik yang bertanggung jawab, itu dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan publik. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keberlanjutan dan kebutuhan pelestarian lingkungan dapat dianggap sebagai "*public goods*" dalam konteks pendidikan dan informasi. Dalam pembangunan PIT ini konsep edukasi dan informasi public belum terpenuhi. Keempat yaitu Preservasi Lingkungan untuk Kesejahteraan Bersama. pembangunan PIT dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, seperti pemeliharaan ekosistem laut dan kawasan pesisir, maka ini dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap lingkungan yang sehat, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai "*public goods*". Keseimbangan ekologi dan pelestarian lingkungan adalah aspek yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

*Keempat* adalah dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata. Plaza Ikan Tuban memiliki daya tarik tersendiri, dimana PIT ini merupakan plaza ikan pertama yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan potensi

pariwisata di Kabupaten Tuban baik wisata religi dan potensi pariwisata alam, sehingga Sebagian besar pengunjung yang berwisata akan mampir ke PIT untuk membeli oleh-oleh di sana (Imron, 2022). Selain itu, pesisir pantai Tuban memiliki potensi budaya yang menarik dan bisa dikembangkan. Terdapat *event* tahunan seperti kirab budaya pesisir yang dimulai dari Plaza Ikan menuju ke wisata pantai Boom, wisata petik laut yang merupakan salah satu rangkaian acara ritual sedekah hasil laut sebagai budaya yang perlu di lestarikan (Novriansyah, 2022)

Dengan berbagai rangkaian *event* ini dapat dijadikan sarana memunculkan agenda wisata baru yang memiliki *multiplier effect* baik dari segi budaya, kearifan lokal, hingga ekonomi. Berbagai daerah telah membangun sektor pariwisata dengan membangun *event-event* budaya dan pesisir seperti di Banyuwangi yang memang memberikan efek berganda pada sektor ekonomi lokal baik secara langsung maupun tidak langsung (Putra et al., 2017). Hal yang sama dilakukan pemerintah daerah kabupaten jember dalam membangun pariwisata dengan adanya kolaborasi pemerintah daerah, seniman setempat dan media dalam merancang event tahunan yaitu *Jember Fashion Carnival* (JFC) yang tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga memainkan peran penting dalam regenerasi bisnis. selain itu, acara ini secara signifikan berkontribusi terhadap citra kota kabupaten jember sebagai salah satu destinasi wisata kreatif (Destari, 2017).

Selain kebijakan yang diharapkan, terdapat juga dampak yang tidak diharapkan. Kebijakan yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) dari kebijakan pembangunan PIT adalah berupa penurunan pendapatan pedagang yang direlokasi. Salah satu elemen paling krusial dalam sistem perdagangan bagi para pedagang adalah pendapatan. Terlepas dari bentuk atau cara perdagangan yang dilakukan, tujuan utama mereka tetaplah untuk menghasilkan pendapatan (Arfiani, 2017). Adanya fenomena relokasi PKL ini tentu memberikan dampak pada pendapatan masyarakat berupa penurunan pendapatan yang terjadi akibat adanya relokasi PKL. Penurunan akibat relokasi ini juga banyak terjadi dis ejumlah daerah seperti di Yogyakarta misalnya, dampak relokasi PKL dari Jalan Malioboro ke Teras Malioboro mengakibatkan pendapatan yang menurun karena sedikitnya wisatawan yang berkunjung (Anggraeni, 2022). Hal yang sama terjadi di Kota Surabaya, dimana masih sepihnya sentra ikan bulak sebagai tempat relokasi baru PKL sehingga mengalami penurunan pendapatan dan masih ditemukan pedagang yang kembali berjualan di pinggir jalan (Nurany, 2017). Hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya penolakan PKL untuk tetap berjualan di PIT karena terjadi penurunan pendapatan yang signifikan.

Namun dengan adanya PIT nantinya akan berdampak luas ketika masyarakat mulai mengetahui adanya Plaza Ikan pertama di Indonesia yang memiliki daya tarik unik sehingga dapat

memiliki dampak signifikan dalam jangka panjang, terutama dalam konteks pariwisata. dampaknya akan dirasakan dalam beberapa tahun ke depan ketika wisatawan mulai datang dan menghabiskan waktu di daerah tersebut. Penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pertumbuhan pariwisata dengan bijak, memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangan.

Selain itu, penuhnya tempat relokasi sehingga tidak bisa menampung semua pedagang ikan kaki lima. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar sekitar akibat dari penuhnya kios yang ada di lantai satu dan tidak dapat menjangkau semua PKL yang terdata. Dengan berbagai masalah tersebut, Plaza Ikan dianggap oleh sebagian masyarakat Kabupaten Tuban bukan tempat yang pas untuk berdagang ikan, lantaran tempat yang dianggap sempit tidak mampu menampung seluruh penjual ikan di Tuban (Witra, 2023). Masalah ini dapat menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan langkah-langkah seperti perluasan kapasitas Plaza Ikan, pengelolaan yang baik terhadap tempat relokasi, dan konsultasi aktif dengan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang akomodatif dan berkelanjutan. Perencanaan tata ruang yang cermat juga menjadi kunci untuk mengakomodasi keberagaman pedagang dan memenuhi kebutuhan komunitas. Dengan pendekatan ini,

diharapkan dapat ditemukan solusi yang memadai untuk meningkatkan keberlanjutan Plaza Ikan sambil memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

### **1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang atau kelompok yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan**

Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang atau kelompok yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan seperti ini disebut limbah kebijakan (*spillover effects/externalities*) yang bisa berdampak positif atau negatif. pembangunan seringkali melibatkan berbagai pihak dan memerlukan pertimbangan keseimbangan kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kelompok yang bukan menjadi sasaran utama kebijakan, prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas dan tidak meninggalkan kelompok tertentu di belakang.

Pembangunan Plaza Ikan (PIT) menimbulkan dampak yang kompleks pada situasi dan beberapa kelompok yang bukan menjadi sasaran utama kebijakan. Salah satu kelompok yang terpengaruh adalah masyarakat sekitar, yang menghadapi gangguan signifikan karena kurangnya tempat parkir khusus untuk mobil. Keadaan ini mengakibatkan banyaknya mobil yang parkir liar di sekitar rumah warga, menciptakan ketidaknyamanan dan potensi konflik (Suprpti, Munir, &

Zaenuddin, 2020). Peningkatan persaingan dan tekanan lingkungan turut memberikan dampak, mengubah dinamika lokal dan meningkatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut. Persaingan dalam mendapatkan pembeli terkadang dilakukan dengan cara yang tidak wajar yaitu menurunkan harga ikan yang tidak sesuai dengan harga jual dengan asumsi dagangan cepat laku (Suprapti, Munir, & Zainuddin, 2020).

Selain itu, situasi yang terkait dengan pandemi Covid-19 juga menjadi faktor tambahan yang memperumit dampak kebijakan pembangunan, memunculkan dinamika baru dalam tata kelola dan keberlanjutan pembangunan tersebut. Menyimak dampak langsung terhadap sektor informal, penghasilan pedagang kaki lima (PKL) ikan mengalami penurunan yang signifikan. Kendala tambahan muncul karena daya awet ikan yang terbatas, yang dapat mempersulit pemasaran apabila stok ikan tidak cepat habis terjual. Keberlanjutan usaha para pedagang menjadi semakin kompleks karena ikan yang tidak terjual pada hari yang sama akan disimpan di lemari es dan dijual kembali pada hari berikutnya. Jika hingga hari ketiga stok ikan tidak terserap pasar, penjualan dengan harga murah sebagai campuran pakan ternak menjadi solusi yang diambil. Dengan demikian, situasi ini memperlihatkan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan secara mendalam dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif dan berkelanjutan (Bashori et al., 2020). Oleh

karena itu, diperlukan upaya serius untuk memitigasi dampak negatif tersebut dengan merancang kebijakan yang lebih inklusif, melibatkan kelompok terdampak dalam proses pengambilan keputusan, dan merinci tata kelola parkir yang lebih efisien guna mengatasi gangguan masyarakat sekitar.

## **2. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang**

Kebijakan pemerintah terkait pembangunan Plaza Ikan (PIT) memiliki tujuan utama untuk mengatasi kekurangan yang ada dan merubah pola ekonomi masyarakat, baik pada masa sekarang maupun masa mendatang. Dampak dari kebijakan ini terlihat pada kondisi sekarang, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam aspek keamanan dan ketertiban warga setelah adanya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke dalam Plaza Ikan. Perpindahan PKL tersebut menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir, mendukung tata kelola yang lebih baik, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain memberikan dampak pada kondisi sosial, keberadaan Plaza Ikan juga memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah guna mendukung program-program pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat pesisir. Plaza Ikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual-beli, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pemberdayaan. Fasilitas ini berperan sebagai wadah dan fasilitator bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk

mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Plaza Ikan tidak hanya membentuk infrastruktur fisik yang memadai, tetapi juga mendukung

transformasi ekonomi dan memberdayakan masyarakat di sektor perikanan, memberikan kontribusi positif dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4. Program, kegiatan dan hasil pemberdayaan masyarakat pesisir 2019  
Sumber: (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2019)

Kegiatan	Hasil	Anggaran (Rp.)
Pemberdayaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	<p>Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi pendidikan gemar ikan bagi kalangan siswa SD/Sederajat</p> <hr/> <p>Terlaksananya pengawasan dan pembinaan mutu ikan di 43 unit pengolah ikan meliputi: data umum UMKM, aspek teknis (lokasi, bangunan, tata letak, peralatan pengolahan, penerapan sanitasi dan higienis, pengelolaan produksi, pengemasan dan pelabelan seta pengelolaan limbah.</p> <hr/> <p>Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan terhadap pembinaan kelompok dan penilaian kelas kelompok</p>	188.105.200

Tabel di atas menggambarkan pelaksanaan program Pemberdayaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan dan Peternakan. Program ini memiliki tiga indikator pencapaian yang terukur, dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program mencapai total sebesar Rp. 188.105.200. Informasi tersebut mencerminkan upaya konkret pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perikanan, dengan memberikan fokus pada

pemberdayaan kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Hasil capaian yang tercantum dalam tabel dapat memberikan gambaran awal tentang efektivitas dan dampak program tersebut dalam memberikan dukungan kepada kelompok tersebut.

Program Pemberdayaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan yang terdata dalam tabel menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sektor perikanan. Anggaran yang signifikan

yang dialokasikan untuk program tersebut mencerminkan urgensi dan prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat daya saing kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di sektor ini. Dengan adanya informasi yang terstruktur dalam tabel, pihak terkait dan masyarakat dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pencapaian dan efisiensi program tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tuban.

Dampak yang diharapkan dari kebijakan pembangunan Plaza Ikan (PIT) adalah munculnya efek multiplier yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Plaza Ikan diantisipasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan peluang baru dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Keberadaan PIT diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor perikanan dan pariwisata.

Efek multiplier menciptakan suatu spiral pertumbuhan, di mana peningkatan aktivitas ekonomi di Plaza Ikan akan merangsang kegiatan ekonomi di sekitarnya. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor perikanan dan usaha pendukung lainnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap barang dan jasa lokal. Dengan demikian, kebijakan pembangunan ini diharapkan dapat

menciptakan dampak positif yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Selain itu, Plaza Ikan juga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat mengundang kunjungan wisatawan, menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan pariwisata, PIT diharapkan dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang, menjadikan daerah tersebut sebagai destinasi unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Dampak kebijakan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana dialami oleh anggota- anggota masyarakat**

Kebijakan pembangunan Plaza Ikan (PIT) diharapkan dapat menciptakan dampak positif dengan efek multiplier yang signifikan, membawa perubahan positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Plaza Ikan ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor perikanan dan pariwisata. Efek multiplier diharapkan mampu menciptakan suatu spiral pertumbuhan, dimana peningkatan aktivitas ekonomi di Plaza Ikan akan memberikan dorongan positif pada sektor-sektor terkait, memacu

peningkatan pendapatan masyarakat, dan merangsang permintaan akan barang dan jasa lokal. Dengan demikian, kebijakan pembangunan PIT diharapkan menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang holistik.

Seiring dengan efek *multiplier*, Plaza Ikan juga diantisipasi menjadi destinasi pariwisata yang menarik, mendorong kunjungan wisatawan dan menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat. Fasilitas yang disediakan oleh PIT diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing wilayah tersebut dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, keberadaan Plaza Ikan bukan hanya sebagai pusat ekonomi lokal, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan dengan cermat, mempertimbangkan aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, keterlibatan masyarakat setempat, dan pemantauan dampak sosial-ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, Plaza Ikan diharapkan menjadi model pembangunan yang komprehensif, berkontribusi secara positif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Pembangunan Plaza Ikan Tuban (PIT) memiliki dampak yang kompleks pada masyarakat sekitar. Meskipun

tujuan pembangunan PIT adalah untuk meningkatkan pendapatan pedagang ikan dan mengembangkan sektor pariwisata, penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pedagang mengalami penurunan pendapatan setelah berjualan di PIT. Dampak kebijakan ini juga mencakup persaingan harga yang tidak wajar dan konflik antar pedagang akibat kebijakan pembangunan PIT. Dampak negatif ini juga mencakup gangguan parkir, penurunan pendapatan pedagang kaki lima, dan dampak lingkungan. Meskipun demikian, pembangunan PIT juga memberikan dampak positif seperti peningkatan keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan peningkatan ekonomi daerah. Dampaknya juga mencakup efek *multiplier* yang diharapkan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan.

Evaluasi kebijakan pembangunan PIT juga menyoroti pentingnya infrastruktur fisik dalam mendukung fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infrastruktur fisik merupakan aspek vital bagi sektor bisnis dan industri, dan pemerintah daerah perlu memperhatikan hal ini. Dampak kebijakan pembangunan PIT diharapkan dapat memajukan sektor perikanan, meningkatkan pendapatan asli daerah, merelokasi pedagang kaki lima, dan memberikan fasilitas yang lebih memadai. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang cermat dan keseimbangan kepentingan untuk memastikan pembangunan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Beberapa saran yang peneliti berikan untuk pemangku kepentingan pembangunan PIT ini adalah *Pertama*, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan pembangunan Plaza Ikan Tuban (PIT) terhadap masyarakat pesisir. Penelitian ini dapat melibatkan analisis kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan secara lebih terukur, seperti penurunan pendapatan secara persentase, perubahan harga, atau dampak lingkungan secara numerik. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas cakupan dengan melakukan studi perbandingan dengan kasus pembangunan PIT di lokasi lain atau dengan proyek serupa di tempat lain. Hal ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang dampak kebijakan ini dan strategi yang efektif untuk mengelolanya. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik perlu disusun untuk memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari pembangunan PIT. Rekomendasi ini dapat mencakup perencanaan yang lebih inklusif, standarisasi harga, dan strategi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kedua, integrasi data dari berbagai sumber seperti artikel akademis, laporan pemerintah, dan data lapangan akan memperkaya analisis mengenai dampak kebijakan pembangunan PIT. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam tentang dampak kebijakan ini terhadap masyarakat pesisir. Selain

itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari pembangunan PIT. Rekomendasi ini dapat mencakup perencanaan yang lebih inklusif, standarisasi harga, dan strategi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

## REFERENSI

- Agung Husein S Pangkey Alden Laloma, M. M. (2020). Dampak Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu On Mall Di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Agustina, I. N. S. (2020). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2014 - 2018* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/79656/>
- Amiri, R. S., Dengo, S., & Londa, V. (2017). Dampak Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Kepulauan Nain Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Anderson, J.E. (1984). *Pembuatan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Anggraeni, N. (2022). *DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN MALIOBORO TERHADAP PARA PEDAGANG* [Thesis]. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Arfiani, R. I. (2017). Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima

- (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo). *Publika*, 5(4).
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Realisasi Pendapatan Pemerintah (Rupiah), 2018-2019*.  
<https://tubankab.bps.go.id/indicator/101/83/1/realisasi-pendapatan-pemerintah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan Kabupaten Tuban 2021-2023*.  
<https://tubankab.bps.go.id/indicator/23/45/1/kemiskinan.html>
- Bashori, S., Munir, M., & Suprpti, Y. (2020). Keberadaan Plaza Ikan Sebagai Tempat Untuk Mengakomodasi Pedagang Ikan Asap Yang Representatif Wahana Pengenalan Produk Unggulan Dan Peningkatan Pendapatan Penjual Ikan Asap Desa Karang Sari Tuban. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 112-118.
- Canning, D. (1999). *Infrastructure's Contribution to Aggregate Output*. The World Bank.  
<https://doi.org/10.1596/1813-9450-2246>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). CRESWELL, J.W. 2013. QUALITATIVE INQUIRY AND RESEARCH DESIGN. *Granola Gradschool and Goffman*.
- Debila, N. K. (2023, April 15). *10 Daerah Termiskin di Jawa Timur Versi BPS, Didominasi Madura*. Berita Satu.
- Destari, F. (2017). Meningkatkan Intention To Revisit Melalui Keunikan Jasa Pariwisata & Destination Image: Studi Kasus Pada Big Event JFC. *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia*, 1(1), 44-58.  
[www.apmai.orghttps://journal.apmai.org/v2/index.php/jmkli](https://journal.apmai.org/v2/index.php/jmkli)
- Febriandini, C., Dupuy, G. L. P., & Baeda, A. Y. (2023). Strategi Peningkatan Capacity Building Nelayan Pengolah Hasil Tangkap Sesuai Dengan Sdgs Ke 14 Di Wilayah Pesisir Kota Batam. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 204-210.  
<https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31621>
- Grigg, N. S. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. Wiley.
- Hilal, S. (2017). *Gagasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Kalimantan Timur Dalam Nkri*. Universitas Islam Indonesia.
- Imron. (2022, February 17). *5 Tempat Wisata Belanja di Tuban, Ada Swalayan Hingga Plaza Ikan*. IDN Times.  
<https://jatim.idntimes.com/travel/destination/imron/5-tempat-wisata-belanja-di-tuban-c1c2>
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(2), 129-141.  
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Iswanto, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai*

- Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban)* [University of Brawijaya].  
<http://repository.ub.ac.id/id/ep rint/184074/>
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Lewis, W. A. (1994). *Perencanaan pembangunan: Dasar-dasar kebijaksanaan ekonomi*. Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., Saldaña, J., & Ridder, H. G. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook*. *Zeitschrift Fur Personalforschung*.
- Mubiina, F. A. (2020). Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution Di Indonesia. *Jurnal Sasi*, 26(1), 52–74.
- Muhammad, F. (2008). *Reinventing local government: pengalaman dari daerah* (L. Toruan & Rayendra, Eds.). Kompas Gramedia.
- Novriansyah, R. (2022, September 15). *Nelayan Kabupaten Tuban Menggelar Wisata Petik Laut Sebagai Wujud Rasa Syukur*. INews.  
<https://tuban.inews.id/read/170689/nelayan-kabupaten-tuban-menggelar-wisata-petik-laut-sebagai-wujud-rasa-syukur/3>
- Nurany, F. (2017). *Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Ikan Bulak Di Surabaya Dalam Perspektif Deliberatif* [Tesis]. Universitas Airlangga.
- Nurdiansyah, I. S., Helena, S., & Amran, A. (2023). Profil FoodHabits pada Keluarga Nelayan di Pesisir Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan. *Empiricism Journal*, 4(2), 442–449.  
<https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1620>
- Pasolong, H. (2021). *Kepemimpinan birokrasi*. In *Alfabeta*.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2019). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tuban Tahun 2019*.
- Putra, A. P., Wijayanti, T., & Prasetyo, J. S. (2017). Analisis Dampak Berganda (Multiplier Effect) Objek Wisata Pantai Watu Dodol Banyuwangi. *Journal of Tourism and Creativity*, 1(2), 141–154.
- Ramadhani, A. (2017). *Pemberdayaan Hasil Perikanan Masyarakat Pesisir Pantai Jakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu].  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/2935/>
- Saptutyningsih, E. (2023). *Monograf: Hutan Mangrove: Valuasi Ekonomi dan penerapannya dalam berbagai penelitian*. P4I.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4uHQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Berdasarkan+data,+wilayah+pesisir+di+Indonesia+terdiri+dari+8.090+desa+dengan+rata-rata+indeks+tingkat+kesmiskinannya+sebesar+0,3241+&ots=7j7QcVDj2O&sig=hcaylajSbKRzDmrLi7ro>

- ypEqijY&redir\_esc=y#v=onepage  
&q&f=false
- Subarsono, A. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Suprapti, Y., Munir, M., & Zaenuddin, M. (2020). Plaza Ikan Sebagai Sentra Perdagangan Ikan Asap Di Kabupaten Tuban. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 46-51.  
<http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM>
- Suprapti, Y., Munir, M., & Zainuddin, Muhammad. (2020). Fish Plaza As A Centre Of Fisheries Product Trading In Tuban Regency, East Java. *Jurnal Ilmu Perikanan Dan Sumberdaya Perairan*, 9(1).
- Umah, S. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Sektor Perikanan (Studi Pengembangan Plaza Ikan di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban)*. Universitas Trunojoyo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi: teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Windasai, Mas'ud, M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 793-804.
- Witra. (2023, January). *Plaza Ikan Penuh, Towil Memilih Jualan Keliling*. Radio Republik Indonesia. [https://www.rri.co.id/daerah/140080/plaza-ikan-penuh-towil-memilih-jualan-keliling??utm\\_source=editorial\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=general\\_campaign](https://www.rri.co.id/daerah/140080/plaza-ikan-penuh-towil-memilih-jualan-keliling??utm_source=editorial_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign)